

**TRANSFORMASI ETIKA DIGITAL: MEMBANGUN KEWARGAAN DIGITAL KRITIS
(CRITICAL DIGITAL CITIZENSHIP) DI TENGAH HEGEMONI ALGORITMA**

**Marina Rospitasari¹, Lailatus Sholihah², Dyah Ayu Kusuma Dewandaru³, Wahidah R. Bulan⁴
Daffa Rakha Wijaya⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: dyahayukd@upnvj.ac.id

Email: marinarospitasari@upnvj.ac.id; lailatussholihah@upnvj.ac.id; wr.bulan@upnvj.ac.id;
daffarakha1945@gmail.com

ABSTRACT

The rapid penetration of digital technology, modern society faces an interaction paradox: massive technical connectivity accompanied by increasingly sharp social polarization. This article aims to dissect the failure of conventional digital ethics approaches, which tend to be normative and technical, and offers the Critical Digital Citizenship model as an adaptive solution amidst algorithmic hegemony. Employing a conceptual literature review method, this study synthesizes Mike Ribble's concept of digital citizenship with Paulo Freire's critical pedagogy. The analysis reveals the existence of an "illusion of competence," where users' technical proficiency is not accompanied by critical maturity, thereby creating vulnerability to algorithmic manipulation, disinformation, and data objectification. This study formulates that the "banking concept" approach in digital literacy which solely emphasizes compliance with rules (*dos and don'ts*) has proven to fail in creating permanent behavioral change because it ignores the users' cognitive and affective dimensions. Therefore, the transformation from naive consciousness to critical consciousness (*conscientização*) is an absolute prerequisite for building the sovereignty of digital citizens as empowered subjects. The proposed adaptive digital citizenship model emphasizes the integration of critical reasoning to create a society that is not only massively connected but also cognitively enlightened. This article concludes that strengthening critical reasoning within the higher education curriculum is a strategic imperative for realizing a digital civilization that is democratic, cohesive, and resilient to the challenges of the post-truth era.

Keywords: Algorithmic hegemony, Critical consciousness, Digital citizenship, Media literacy.

ABSTRAK

Di tengah pesatnya penetrasi teknologi digital, masyarakat modern menghadapi paradoks interaksi: keterhubungan teknis yang masif namun diiringi oleh polarisasi sosial yang semakin tajam. Artikel ini bertujuan untuk membedah kegagalan pendekatan etika digital konvensional yang cenderung bersifat normatif dan teknis, serta menawarkan model Kewargaan Digital Kritis (*Critical Digital Citizenship*) sebagai solusi adaptif di tengah hegemoni algoritma. Menggunakan metode kajian pustaka konseptual (*conceptual literature review*), studi ini mensintesis konsep kewargaan digital dari Mike Ribble dengan pedagogi kritis Paulo Freire. Hasil analisis menunjukkan adanya "ilusi kompetensi" di mana kemahiran teknis pengguna tidak dibarengi dengan kedewasaan kritis, sehingga menciptakan kerentanan terhadap manipulasi algoritma, disinformasi, dan objektivikasi data. Studi ini merumuskan bahwa pendekatan "gaya bank" dalam literasi digital yang hanya menekankan kepatuhan aturan (*dos and don'ts*) terbukti gagal menciptakan perilaku permanen karena abai terhadap dimensi kognitif dan afektif pengguna. Oleh karena itu, transformasi dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis (*conscientização*) menjadi prasyarat mutlak untuk membangun kedaulatan warga digital sebagai subjek yang berdaya. Model kewargaan digital adaptif yang diusulkan menekankan pada integrasi nalar kritis untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

141

Indexed:



SINTA 4



terkoneksi secara masif, tetapi juga tercerahkan secara kognitif. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan nalar kritis dalam kurikulum pendidikan tinggi merupakan imperatif strategis untuk mewujudkan peradaban digital yang demokratis, kohesif, dan resilien terhadap tantangan era *post-truth*

Kata kunci: Hegemoni algoritma, Kesadaran kritis, Kewarganegaraan digital, Literasi media.

PENDAHULUAN

Dinamika interaksi sosial masyarakat modern telah mengalami metamorfosis yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Kita sedang menyaksikan pergeseran fundamental di mana ruang digital telah mengambil alih fungsi ruang publik fisik sebagai arena utama pertukaran gagasan dan negosiasi sosial. Transformasi ini, meskipun menawarkan efisiensi konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa serta residu persoalan yang kompleks. Kemudahan penetrasi teknologi justru sering kali berbanding lurus dengan pendangkalan kualitas relasi antarmanusia, menciptakan sebuah paradoks sosiologis: masyarakat merasa terkoneksi secara masif di tingkat global, namun semakin terisolasi dan terpolarisasi secara personal dan ideologis.

Lebih jauh lagi, ekosistem informasi kontemporer kini tengah menghadapi krisis kredibilitas yang berakar pada hegemoni algoritma. Fenomena *post-truth*, di mana emosi dan keyakinan personal lebih mendominasi pembentukan opini publik dibandingkan fakta objektif, telah menjadi lahan subur bagi amplifikasi disinformasi. Dalam konteks sivitas akademika, fenomena ini melahirkan ironi tersendiri. Studi menemukan bahwa meskipun mahasiswa saat ini lahir sebagai *digital natives* dengan intensitas interaksi teknologi yang tinggi, hal tersebut tidak serta-merta mengonversi mereka menjadi entitas yang matang secara etika digital. Banyak pengguna yang mengalami kegalapan epistemologis ketika harus memvalidasi informasi di tengah gempuran konten yang secara masif dikurasi dan kerap dimanipulasi oleh algoritma platform (Fischer et al., 2021). Selama ini, diskursus akademis dan respons praktis dalam merespons krisis informasi tersebut sering kali terjebak pada penguatan kompetensi teknis dan legal-formal. Asumsi dominan yang terbangun adalah: jika masyarakat dibekali keterampilan mengoperasikan perangkat digital dan memahami batasan regulasi (pendekatan normatif), maka iklim digital akan aman. Namun, realitas interaksi digital menunjukkan kegagalan pendekatan tersebut. Kepatuhan normatif terbukti rapuh ketika dihadapkan pada struktur kekuasaan platform yang mendesain algoritmanya untuk memonetisasi emosi dan memicu reaksi reaktif pengguna.

Artikel ini hadir untuk membongkar keterbatasan pendekatan teknis tersebut dan menawarkan perspektif analitis yang lebih radikal dan reflektif. Penulis berargumen bahwa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) konvensional harus diintegrasikan dengan kerangka literasi kritis untuk membongkar struktur hegemoni di balik layar gawai. Tulisan ini akan menguraikan secara konseptual bagaimana sintesis antara etika digital dan kesadaran kritis mampu merumuskan model *Critical Digital Citizenship* (Kewarganegaraan Digital Kritis) sebagai solusi adaptif untuk membebaskan masyarakat dari objektivikasi arus informasi saat ini. Banyak pengguna yang mengalami kegalapan epistemologis ketika harus memvalidasi informasi di tengah gempuran konten yang dikurasi oleh algoritma. Fenomena ini menciptakan sebuah ilusi kompetensi; pengguna merasa berdaya hanya karena menguasai perangkat, padahal mereka rentan secara kognitif. Kesenjangan antara penguasaan teknis dan kesadaran kritis ini dapat dipetakan secara konseptual pada Tabel 1.

Table 1: Pemetaan Paradoks Keterampilan Teknis dan Kesadaran Kritis Pengguna Digital

Dimensi Interaksi Digital	Realitas Kompetensi Teknis (Ilusi Kompetensi)	Kesenjangan Kritis dan Etis	Implikasi Sosiologis
Konsumsi Informasi	Mahir mengakses, membagikan, dan memproduksi ulang	Kegagalan membedakan fakta objektif dengan opini yang dimanipulasi	Rentan terhadap polarisasi ideologis dan amplifikasi disinformasi/hoaks.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

142

Indexed:



SINTA 4



	konten dengan cepat.	(<i>post-truth</i>).	
Relasi Sosial	Terkoneksi secara masif melampaui batas geografis (<i>hyper-connected</i>).	Defisit empati, reaktif terhadap algoritma yang memicu emosi, dan abai etika.	Pendangkalan kualitas relasi antarmanusia dan normalisasi perundungan siber.
Keamanan & Privasi	Cakap mengoperasikan fitur-fitur aplikasi terbaru dan platform media sosial.	Ketidaksadaran terhadap praktik ekstraksi data pribadi dan bias algoritma.	Pengguna tereduksi menjadi objek komodifikasi data di bawah hegemoni platform.

Sumber: Data sekunder diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, terlihat jelas bagaimana "ilusi kompetensi" menjebak masyarakat modern ke dalam kerentanan berlapis. *Pertama*, pada dimensi konsumsi informasi, terlihat adanya krisis epistemologis yang akut. Secara teknis, masyarakat terlihat sangat canggih karena mampu memproduksi dan mendistribusikan ulang konten dalam hitungan detik. Namun, kecepatan ini tidak diimbangi dengan kemampuan kognitif untuk memverifikasi kebenaran. Pengguna mengalami kegagapan karena terjebak di era *post-truth*, di mana emosi dan kepercayaan pribadi lebih mendominasi daripada fakta objektif. Implikasi sosiologisnya sangat fatal; algoritma mengeksploitasi kerentanan kognitif ini dengan menyuapi pengguna melalui informasi yang mengafirmasi keyakinan mereka sendiri (ruang gema), yang pada akhirnya merobek kohesi sosial dan menyuburkan polarisasi.

Kedua, pada dimensi relasi sosial, konektivitas digital yang masif justru melahirkan paradoks kesepian di tengah keramaian digital. Pengguna memiliki kapasitas untuk terhubung secara global, namun hal ini diiringi dengan defisit empati. Arsitektur media sosial didesain untuk memanipulasi emosi dan menghargai respons yang cepat, sehingga pengguna menjadi sangat reaktif. Pendekatan normatif yang hanya menyuruh pengguna untuk patuh sering kali runtuh di titik ini. Kemudahan teknologi justru berbanding lurus dengan penurunan kualitas hubungan antarmanusia, menormalisasi perilaku destruktif seperti perundungan siber (*cyberbullying*), dan mengubah ruang publik yang rasional menjadi arena sentimen yang liar.

Ketiga, pada dimensi keamanan dan privasi, nampak jelas bagaimana pengguna terjebak menjadi "korban" hegemoni algoritma. Pengguna kerap merasa aman dan memegang kendali hanya karena mereka cakap mengoperasikan fitur aplikasi. Padahal, terdapat ketidaksadaran masif bahwa setiap pola interaksi mereka sedang diekstraksi dan diprofilkan oleh platform. Pada titik inilah dominasi algoritma bekerja sempurna; pengguna tidak lagi bertindak sebagai subjek yang otonom, melainkan tereduksi menjadi objek komodifikasi data di bawah struktur kekuasaan platform digital (Irfan & Masyhuri, 2025). Sintesis dari ketiga dimensi pada Tabel 1 tersebut menegaskan bahwa keterampilan teknis semata tidak akan pernah cukup untuk melawan manipulasi struktural. Diperlukan sebuah kesadaran kritis (*conscientização*) agar warga digital mampu memadukan etika perilaku dengan ketajaman nalar, bertransformasi dari sekadar konsumen pasif menjadi peserta aktif yang berdaya dalam ekosistem digital.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan studi kepustakaan konseptual (*conceptual literature review*) sebagai pisau analisis utama. Berbeda dengan penelitian empiris yang mengandalkan data lapangan, tulisan ini berfokus pada penelusuran, pembedahan, dan sintesis mendalam terhadap berbagai teks akademik yang relevan dengan diskursus etika digital. Penulis menempatkan literatur bukan sekadar sebagai referensi, melainkan sebagai data utama untuk membangun argumen teoretis baru (Hawamdeh, 2022).

Sumber data yang digunakan meliputi karya-karya seminal dari tokoh kunci seperti Mike Ribble yang meletakkan dasar konsep kewargaan digital, serta (Ćumura & Petrović, 2022) menawarkan kerangka pedagogi kritis. Untuk menjaga relevansi dengan konteks kekinian, analisis ini juga didukung secara ekstensif oleh jurnal-jurnal sosiologi komunikasi mutakhir yang terbit dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2025). Literatur-literatur ini dipilih secara purposif untuk membedah dinamika interaksi di

media sosial, hegemoni algoritma, dan tantangan disinformasi. Proses analisis dilakukan dengan mempertemukan kedua perspektif teoretis tersebut secara dialektis. Penulis tidak hanya menjabarkan definisi, tetapi berupaya mencari titik temu dan kesenjangan di antara keduanya untuk menjawab tantangan etika digital kontemporer. Melalui sintesis ini, diharapkan lahir sebuah kerangka berpikir integratif yang mampu menjelaskan fenomena kewargaan digital secara lebih utuh dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

PEMBAHASAN

Kewargaan Digital dan Pedagogi Kritis

Perilaku pengguna internet tidak dapat dilepaskan dari konsep *Digital Citizenship*. Dalam literatur mutakhir, seperti yang diulas oleh (BinJwair & Bingimlas, 2024), konsep ini telah berkembang dari sekadar etiket berinternet menjadi seperangkat nilai yang mencakup rasa hormat (*respect*), pendidikan (*educate*), dan perlindungan (*protect*). Penelitian (Japar et al., 2024) menambahkan bahwa penanaman nilai-nilai ini krusial untuk menjaga iklim digital yang sehat dan mencegah perilaku destruktif seperti perundungan siber, yang menjadi fondasi normatif dalam menjaga ketertiban sosial di dunia maya. Namun, ketertiban saja tidak cukup untuk melawan manipulasi yang bersifat struktural. Di sinilah peran literasi kritis menjadi vital. (Rohman, 2022) menekankan bahwa warga negara muda memerlukan kemampuan untuk membaca konteks dan kepentingan di balik sebuah teks. Senada dengan hal tersebut, (Dass & MPM, 2025) menyebut ini sebagai *Critical Digital Citizenship*, sebuah paradigma yang menggabungkan kepatuhan etis dengan kesadaran politis untuk mempertanyakan status quo informasi.

Landasan ini diperkuat secara lebih mendalam melalui pemikiran (Claes & Philippette, 2020), di mana pendidikan kewargaan digital tidak boleh terjebak dalam "pendidikan gaya bank" (*banking concept of education*) yang memosisikan pengguna hanya sebagai wadah pasif. Sebaliknya, literasi digital harus dimaknai sebagai *palavramundo* kemampuan membaca kata dan dunia secara simultan yang berarti kemampuan membaca realitas kekuasaan, algoritma, dan kepentingan ekonomi yang membentuk sebuah teks. Transisi dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis (*critical consciousness*) menjadi prasyarat mutlak agar warga digital bertransformasi dari sekadar objek data menjadi subjek yang berdaya (Ćumura & Petrović, 2022). Kerangka teoretis inilah yang digunakan sebagai pisau analisis dalam artikel ini untuk membedah paradoks kompetensi digital yang terjadi di lapangan

Keterbatasan Pendekatan Teknis Normatif

Pendekatan konvensional dalam literasi digital sering kali berhenti pada level "dos and don'ts". Misalnya, pengguna diajarkan untuk tidak menyebarkan hoaks karena itu melanggar hukum. Namun, pendekatan ini luput menyentuh aspek kognitif: mengapa seseorang mempercayai hoaks tersebut sejak awal? Penelitian (Novianti et al., 2026) menemukan bahwa tanpa intervensi yang menasar aspek kognitif dan afektif, perilaku pengguna sulit berubah secara permanen. Pengguna mungkin patuh karena takut sanksi, bukan karena kesadaran.

Di tengah algoritma media sosial yang didesain untuk memanipulasi emosi, kepatuhan yang didasari rasa takut akan mudah runtuh. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan literasi digital yang menyeluruh, mencakup pemahaman mendalam tentang algoritma dan etika digital, agar pengguna dapat berperilaku lebih kritis dan bertanggung jawab (Angelia & Simanjorang, 2024). Dengan demikian, pendekatan yang lebih holistik dalam pendidikan literasi digital dapat membekali individu dengan keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya. Pendidikan berbasis berpikir kritis dapat membantu Generasi Z untuk lebih memahami dan mengevaluasi informasi yang mereka terima, sehingga mengurangi penyebaran hoaks dan meningkatkan kesadaran etis dalam penggunaan media sosial (Anisti, et al., 2024). Di tengah algoritma media sosial yang didesain untuk memanipulasi emosi, kepatuhan yang didasari rasa takut akan mudah runtuh. Kesenjangan fundamental antara pendekatan lama dan kebutuhan literasi saat ini dapat dilihat pada tabel 2.

Table 2: Pendekatan Literasi Digital Konvensional dan Holistik/Kritis

Aspek Perbandingan	Pendekatan Konvensional (Normatif)	Pendekatan Holistik/Kritis (Adaptif)
Fokus Utama Pembelajaran	Hafalan aturan normatif dan batasan hukum (<i>dos and don'ts</i>).	Pemahaman struktur algoritma dan evaluasi informasi secara dekonstruktif.
Dimensi Psikologis yang Disasar	Hanya pada tingkat perilaku tampak (<i>behavioral compliance</i>).	Menyentuh akar masalah pada aspek kognitif dan afektif pengguna.
Akar Motivasi Pengguna	Kepatuhan yang didasari rasa takut terhadap sanksi/hukuman.	Kepatuhan yang didorong oleh kesadaran kritis dan tanggung jawab etis.
Ketahanan terhadap Algoritma	Rentan; pertahanan mudah runtuh saat algoritma memanipulasi emosi.	Tangguh; pengguna mampu mengambil jarak refleksif dari provokasi konten.
Dampak Jangka Panjang	Perubahan perilaku bersifat sementara (tidak permanen).	Perubahan perilaku permanen, menekan laju hoaks secara terstruktur.

Sumber: Data sekunder diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2, terlihat jelas bahwa pendekatan konvensional terbukti memiliki cacat epistemologis karena memposisikan etika digital sebatas regulasi. Pengguna mungkin patuh karena takut sanksi, bukan karena kesadaran. Motif kepatuhan yang didasari oleh rasa takut ini menciptakan sebuah "kepatuhan semu". Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika dihadapkan pada arsitektur media sosial modern. Di tengah algoritma media sosial yang didesain untuk memanipulasi emosi, kepatuhan yang didasari rasa takut akan mudah runtuh. Ketika algoritma memicu kemarahan atau ketakutan pengguna (afektif), rasionalitas hukum yang diajarkan oleh pendekatan normatif akan serta-merta hancur, dan pertahanan etis pengguna akan goyah.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan literasi digital yang menyeluruh, mencakup pemahaman mendalam tentang algoritma dan etika digital, agar pengguna dapat berperilaku lebih kritis dan bertanggung jawab. Pendekatan yang lebih holistik ini memberikan pengguna kemampuan untuk mengambil jarak refleksif dari konten yang provokatif. Dengan demikian, pendekatan yang lebih holistik dalam pendidikan literasi digital dapat membekali individu dengan keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya.

Pada akhirnya, hasil dari pergeseran paradigma ini berimplikasi pada ketahanan jangka panjang. Pendidikan berbasis berpikir kritis dapat membantu Generasi Z untuk lebih memahami dan mengevaluasi informasi yang mereka terima, sehingga mengurangi penyebaran hoaks dan meningkatkan kesadaran etis dalam penggunaan media sosial (Anisti et al., 2024). Mereka tidak sekadar menjadi entitas yang patuh, melainkan berdaya untuk mendekonstruksi teks dan secara aktif mempromosikan kesadaran etis di ekosistem digital.

Urgensi Integrasi Nalar Kritis

Temuan studi menunjukkan bahwa solusi yang paling menjanjikan adalah menanamkan nalar kritis sebagai inti dari kewarganegaraan digital. Penelitian (Meier & Johnson, 2022) menjelaskan bahwa literasi digital kritis memungkinkan pengguna untuk mengambil jarak dari konten yang mereka konsumsi. Alih-alih langsung bereaksi (share/like), pengguna yang kritis akan melakukan verifikasi dan refleksi. Dalam konteks pendidikan tinggi, (Arkorf et al., 2024) menyarankan agar kurikulum tidak lagi dipisah antara kemampuan teknis dan kemampuan berpikir; keduanya harus diajarkan sebagai satu kesatuan. Peran pendidik dalam menumbuhkan kewarganegaraan digital yang kritis sangat signifikan karena mereka berfungsi sebagai fasilitator dalam menjembatani kesenjangan antara keterampilan teknis dan kesadaran kritis.

Menurut (Japar et al., 2024) mengintegrasikan strategi pedagogis yang menekankan pemikiran kritis dalam kurikulum literasi digital dapat memberdayakan siswa untuk menavigasi kompleksitas lanskap

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

145

Indexed:



SINTA 4



digital dengan lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan generasi yang mahir dalam membedakan informasi yang kredibel tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dalam interaksi digital mereka. Seperti yang disorot oleh (Chookaew et al., 2024) tanpa fokus pada dimensi kognitif dan afektif, upaya untuk mengubah perilaku pengguna mungkin tetap dangkal. Dengan demikian, membayangkan kembali kerangka pendidikan untuk mencakup kemahiran teknis dan keterlibatan kritis sangat penting untuk mengembangkan warga digital berpengetahuan yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis, melawan daya pikat misinformasi dan manipulasi algoritmik. Temuan dari berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa solusi yang paling menjanjikan dalam menghadapi krisis informasi saat ini adalah menanamkan nalar kritis sebagai inti dari kewargaan (Tirza et al., 2025). Mengingat kompleksitas lanskap media digital, literatur-literatur terbaru menegaskan bahwa pergeseran dari sekadar penguasaan teknis menuju kesadaran kritis telah menjadi sebuah keharusan pedagogis. Pemetaan mengenai urgensi dan implikasi integrasi nalar kritis berdasarkan pandangan berbagai pakar dapat disintesis pada Tabel 3.

Table 3: Urgensi Integrasi Nalar Kritis dalam Kewargaan Digital

Fokus Argumen Utama	Implikasi terhadap Pendidikan Literasi Digital
Penanaman nalar kritis sebagai inti (pondasi) kewargaan digital.	Menjadi kerangka solusi paling adaptif dan menjanjikan untuk memecahkan krisis di ruang digital.
Pengambilan jarak refleksif terhadap konten media sosial.	Mengubah pola perilaku pengguna dari sekadar impulsif-reaktif (<i>share/like</i>) menjadi evaluatif-verifikatif.
Penyatuan kompetensi teknis dan kemampuan berpikir kritis.	Kurikulum pendidikan tinggi tidak boleh memisahkan kedua aspek tersebut; pendidik wajib menjadi fasilitator penengahnya.
Integrasi pedagogi berbasis pemikiran kritis.	Memberdayakan siswa untuk menavigasi lanskap digital yang kompleks, membedakan informasi kredibel, dan bertindak etis.
Intervensi pada dimensi kognitif dan afektif pengguna.	Mencegah kepatuhan/perubahan perilaku yang dangkal agar dapat melawan manipulasi algoritmik secara permanen.

Sumber: Data sekunder diolah oleh penulis (2026)

Merujuk pada sintesis Tabel 2, setiap literatur memberikan penekanan yang saling melengkapi mengenai pentingnya nalar kritis. (Meier & Johnson, 2022) berargumen bahwa literasi digital kritis memungkinkan pengguna untuk mengambil jarak refleksif dari konten yang mereka konsumsi. Alih-alih langsung bereaksi secara impulsif (seperti *share* atau *like*), pengguna yang kritis akan memiliki jeda kognitif untuk melakukan verifikasi dan refleksi.

Proses refleksi ini mensyaratkan adanya perombakan dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, (Arkorful et al., 2024) menyarankan agar kurikulum tidak lagi memisahkan antara kemampuan teknis dan kemampuan berpikir; keduanya harus diajarkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam hal ini, peran pendidik menjadi sangat signifikan untuk menumbuhkan kewarganegaraan digital yang kritis, di mana mereka tidak lagi sekadar menjadi instruktur teknis, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan antara keterampilan digital dan kesadaran kritis mahasiswanya. Lebih lanjut, menurut (Japar et al., 2024) mengintegrasikan strategi pedagogis yang menekankan pemikiran kritis ke dalam kurikulum dapat memberdayakan siswa untuk menavigasi kompleksitas lanskap digital dengan lebih efektif. Pendekatan terpadu ini tidak hanya menumbuhkan generasi yang mahir secara epistemologis dalam membedakan informasi yang kredibel, tetapi juga secara aktif menanamkan rasa tanggung jawab dalam interaksi digital mereka.

Tanggung jawab inilah yang memastikan perubahan perilaku terjadi secara substantif. Seperti yang disorot oleh (Chookaew et al., 2024), tanpa adanya fokus intervensi pada dimensi kognitif dan afektif, upaya untuk mengubah perilaku pengguna mungkin akan tetap dangkal dan mudah dikompromikan. Dengan demikian, membayangkan kembali kerangka pendidikan yang secara holistik mencakup kemahiran teknis sekaligus keterlibatan kritis sangatlah vital.

Model Kewargaan Digital Adaptif

Warga digital adaptif adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan pegangan etika. Mereka memahami bahwa teknologi tidak netral, dan oleh karena itu, sikap skeptis yang sehat diperlukan. Sebagaimana disarankan oleh (Dass & MPM, 2025), pendidikan harus bergerak dari mencetak pengguna yang "patuh" menjadi pengguna yang "berdaya". Keberdayaan ini terlihat ketika pengguna berani melaporkan konten berbahaya, melindungi data pribadi mereka secara proaktif, dan mengedukasi lingkungan sekitarnya.

Kebutuhan akan kerangka kerja yang kuat untuk kewarganegaraan digital melampaui perilaku pengguna individu untuk mencakup implikasi sosial yang lebih luas, terutama dalam menumbuhkan budaya ketahanan digital. Seperti yang disorot oleh penelitian terbaru, munculnya informasi yang salah dan bias algoritmik memerlukan respons kolektif yang memprioritaskan tidak hanya pemberdayaan individu tetapi juga keterlibatan dan kolaborasi masyarakat (Rullah et al., 2024). Ini dapat dicapai melalui inisiatif yang mempromosikan literasi digital di berbagai demografi, memastikan bahwa semua anggota komunitas, terlepas dari kemahiran teknologi mereka, dapat menilai secara kritis dan berinteraksi dengan konten digital (Anisti et al., 2024). Dengan menumbuhkan lingkungan yang mendorong dialog dan pembelajaran bersama, kita dapat mengubah konsumen informasi pasif menjadi peserta aktif dalam lanskap digital, yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang lebih terinformasi dan kohesif yang lebih siap untuk menavigasi kompleksitas era digital.

Table 4: Dimensi Karakteristik Model Kewargaan Digital Adaptif

Aspek Pembentuk	Dimensi Individu (Mikro)	Dimensi Sosial/Kolektif (Makro)
Prinsip Kesadaran	Memahami bahwa teknologi tidak netral; memerlukan sikap skeptis yang sehat.	Menyadari bahwa disinformasi dan bias algoritmik adalah ancaman yang membutuhkan respons kolektif.
Fokus Pendidikan	Bergerak dari mencetak pengguna yang "patuh" menjadi pengguna yang "berdaya".	Mempromosikan inisiatif literasi lintas demografi, tanpa memandang tingkat kemahiran teknis.
Bentuk Aksi (Praksis)	Berani melaporkan konten berbahaya dan melindungi data pribadi secara proaktif.	Mendorong dialog komunal, kolaborasi, dan pembelajaran bersama di masyarakat.
Transformasi Peran	Dari sekadar mematuhi aturan (<i>dos and don'ts</i>) menjadi mengedukasi lingkungan sekitarnya.	Dari sekumpulan konsumen informasi pasif menjadi peserta aktif dalam lanskap digital.
Tujuan Akhir (<i>Outcome</i>)	Menjadi individu tangguh dengan pegangan etika yang kuat di tengah perubahan teknologi.	Membentuk masyarakat yang kohesif, terinformasi, dan memiliki budaya ketahanan digital (<i>digital resilience</i>).

Sumber: Data sekunder diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 4, esensi dari kewargaan digital adaptif terletak pada pergeseran dari paradigma kepatuhan pasif menuju keberdayaan aktif. Pada tingkat individu, mereka memahami bahwa teknologi tidak netral, dan oleh karena itu, sikap skeptis yang sehat diperlukan. Sebagaimana disarankan oleh (Dass & MPM, 2025) pendidikan harus bergerak dari mencetak pengguna yang "patuh" menjadi pengguna yang "berdaya". Keberdayaan ini terlihat secara nyata dalam praksis sehari-hari, ketika pengguna berani melaporkan konten berbahaya, melindungi data pribadi mereka secara proaktif, dan mengambil inisiatif untuk mengedukasi lingkungan sekitarnya.

Namun, keberdayaan individu saja tidaklah memadai. Kebutuhan akan kerangka kerja yang kuat untuk kewarganegaraan digital melampaui perilaku pengguna individu untuk mencakup implikasi sosial yang lebih luas, terutama dalam menumbuhkan budaya ketahanan digital. Seperti yang disorot oleh penelitian terbaru, munculnya informasi yang salah dan bias algoritmik memerlukan respons kolektif yang

memprioritaskan tidak hanya pemberdayaan individu tetapi juga keterlibatan dan kolaborasi masyarakat.

Tanggung jawab sosial ini dapat dicapai melalui inisiatif yang mempromosikan literasi digital di berbagai demografi, memastikan bahwa semua anggota komunitas, terlepas dari kemahiran teknologi mereka, dapat menilai secara kritis dan berinteraksi dengan konten digital (Anisti et al., 2024). Dengan menumbuhkan lingkungan yang mendorong dialog dan pembelajaran bersama, kita dapat mengubah konsumen informasi pasif menjadi peserta aktif dalam lanskap digital, yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang lebih terinformasi dan kohesif yang lebih siap untuk menavigasi kompleksitas era digital. Transformasi dari dimensi individu menuju tindakan kolektif inilah yang menjadi pilar utama tegaknya Kewargaan Digital Kritis (*Critical Digital Citizenship*).

KESIMPULAN

Tantangan etika digital kontemporer telah bertransformasi menjadi persoalan yang sangat multidimensi, struktural, dan tidak lagi dapat diselesaikan melalui solusi tunggal yang bersifat normatif. Kesesatan berpikir yang selama ini menyamakan kemahiran menggunakan gawai dengan kedewasaan berinternet harus segera didekonstruksi. Kompetensi teknis dalam mengoperasikan perangkat digital mutlak menjadi syarat perlu (*necessary condition*), namun terbukti secara akademis belum menjadi syarat cukup (*sufficient condition*) untuk membentengi pengguna dari manipulasi algoritmik dan gempuran era *post-truth*. Oleh karena itu, gagasan untuk mengintegrasikan literasi kritis ke dalam kerangka kewargaan digital (*Critical Digital Citizenship*) bukan lagi sekadar wacana alternatif, melainkan sebuah imperatif strategis. Integrasi ini bertindak sebagai fondasi filosofis untuk membebaskan pengguna dari "ilusi kompetensi" yang selama ini meninabobokan mereka. Tujuannya jelas melampaui capaian teknis; yakni untuk membangun tatanan masyarakat yang tidak hanya terkoneksi secara masif (*hyper-connected*), tetapi juga tercerahkan secara kognitif. Masyarakat tercerahkan inilah yang mampu mengambil jarak refleksif, menolak direduksi menjadi objek komodifikasi data, dan secara proaktif menjaga kewarasan ruang publik digital.

Sebagai implikasi praktis dari kesimpulan tersebut, naskah ini mendesak agar institusi pendidikan, pembuat kebijakan, dan komunitas penggerak literasi digital segera merevisi dan merekonstruksi materi ajar mereka. Pendekatan pendidikan yang bersifat "gaya bank" (*banking concept of education*) harus ditinggalkan. Fokus kurikulum harus digeser secara radikal: dari sekadar pengenalan fitur alat dan hafalan aturan hukum, menuju penguatan nalar dekonstruktif. Pendidikan literasi harus mampu memfasilitasi lahirnya kesadaran kritis (*conscientização*) agar generasi mendatang tidak hanya cakap menggeser layar, tetapi tajam dalam membedah bias dan kepentingan di balik sebuah konten.

Pada akhirnya, sebagai pijakan bagi diskursus akademik ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk beranjak dari ranah konseptual menuju evaluasi empiris. Sangat direkomendasikan untuk melakukan penelitian terapan yang secara spesifik mengukur efektivitas model pembelajaran berbasis inkuiri kritis. Pengukuran empiris ini perlu diuji keandalannya dalam meningkatkan skor kewargaan digital di berbagai demografi masyarakat secara inklusif. Data empiris tersebut nantinya akan sangat krusial untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan kita, memastikan bahwa ketahanan digital benar-benar dapat diwujudkan sebagai sebuah gerakan kolektif demi terciptanya peradaban digital yang demokratis.

REFERENSI

- Angelia, M., & Simanjorang, C. (2024). Hubungan work-family conflict terhadap burnout syndrome pada pegawai swasta. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(3), 10014–10024.
- Anisti, A., Sidarta, V., Imran, M., & Syatir, S. (2024). Tantangan Literasi Digital Generasi Z: Kajian Sistematis Literature Review. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 30(2), 152–161.
- Arkorful, V., Salifu, I., Arthur, F., & Abam Nortey, S. (2024). Exploring the nexus between digital competencies and digital citizenship of higher education students: a PLS-SEM approach. *Cogent Education*, 11(1), 2326722.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

148

Indexed:



SINTA 4



- BinJwair, A., & Bingimlas, K. (2024). Students' practice of digital citizenship values at prince sattam bin abdulaziz university. *SAGE Open*, 14(2), 21582440241245196.
- Chookaew, S., Kitcharoen, P., Howimanporn, S., & Panjaburee, P. (2024). Fostering student competencies and perceptions through artificial intelligence of things educational platform. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100308.
- Claes, A., & Philippette, T. (2020). Defining a critical data literacy for recommender systems: A media-grounded approach. *Journal of Media Literacy Education*, 12(3), 17–29.
- Ćumura, L., & Petrović, V. (2022). Paulo Freire: From critical consciousness to the pedagogy of the oppressed. *KNOWLEDGE-International Journal*, 55(5), 959–964.
- Dass, A., & MPM, P. K. (2025). Critical Digital Citizenship: Its Conceptualization and Implications for Education. *Innovative Teaching and Learning*, 7(2), 55–68.
- Fischer, P. A., Martin, R., & Straubhaar, T. (2021). Should I stay or should I go? In *International migration, immobility and development* (pp. 49–90). Routledge.
- Hawamdeh, M. (2022). Methods used in digital citizenship: A systematic literature review. *Journal of Digital Educational Technology*.
- Irfan, R., & Masyhuri, M. (2025). Interaksi Sosial dan Era Digital: Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Modern. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 4(1), 698–703.
- Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhillah, D. N. (2024). Students' perspectives on civic education through digital citizenship in the virtual era. *European Journal of Educational Research*, 13(1), 89–102.
- Meier, A., & Johnson, B. K. (2022). Social comparison and envy on social media: A critical review. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101302.
- Novianti, S., Ayuningtyas, W. E. P., Wicaksana, H. D., Pertiwi, G., & Hesti, C. K. (2026). REPRESENTATION, GENDER, AND PUBLIC POLICY: CONTEMPORARY PRACTICES IN INDONESIA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(3), 93–105.
- Rohman, A. (2022). Literasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis di era disrupsi. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 2(1), 40–47.
- Rullah, A. D., Silva, F. R., Teguh, E., Pratama, H., & Purwanto, E. (2024). Strategi komunikasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemuda. *JURNAL PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN MASYARAKAT Учредитель: Indonesian Journal Publisher*, 2(1), 16.
- Tirza, J., Tambunan, A., Parwati, N. N., & Cendana, W. (2025). Enhancing active citizenship: Developing assessment tools for digital literacy and critical thinking in Indonesian Civics Education. *REID (Research and Evaluation in Education)*, 11(1), 75–88.